



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai penyelenggaraan FKP yang telah dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa tahun 2025

Forum Konsultasi Publik ini merupakan salah satu upaya untuk menjangkau masukan dan saran dari masyarakat selaku pengguna layanan, guna meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa. Laporan ini memuat hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan, serta rencana tindak lanjut untuk perbaikan pelayanan di masa mendatang.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan FKP tahun 2025 ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi masukan yang berharga untuk peningkatan pelayanan yang lebih baik lagi.

Demikian kata pengantar ini dibuat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhai upaya kita.

Sumbawa, Oktober 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumbawa,

ABDUL HARIS, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671110 199303 1 023

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2. Penyelenggara dan Peserta FKP
3. Metode Pelaksanaan FKP
4. Susunan Acara FKP

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah
2. Analisis
3. Rencana Aksi

D. PENUTUP

LAMPIRAN I Berita Acara Yang Ditandatangani

LAMPIRAN II Salinan Daftar Hadir

LAMPIRAN III Surat Undangan

LAMPIRAN IV Dokumentasi Kegiatan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi hal yang sangat penting dan merupakan agenda kewajiban terbesar bagi negara. Hal ini karena pelayanan publik selalu berkaitan dengan kepentingan dan pemenuhan kebutuhan khalayak masyarakat luas dimana negara berkewajiban untuk melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik sesuai amanat Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut, seluruh aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat memiliki peranan penting dalam menyediakan layanan publik yang baik dan prima bagi seluruh warga negara dan penduduk sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik yaitu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan aturan perundangundangan bagi warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik yang baik dan prima merupakan pelayanan yang dapat memenuhi dan sesuai antara hasil pelayanan dan harapan penerima pelayanan serta sesuai dengan standar pelayanan. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah menetapkan Peraturan Daerah Sumbawa Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik sebagai pedoman penyelenggaraan layanan.

Namun tak jarang dalam proses penyelenggaraan tersebut muncul permasalahan seperti perbedaan antara kinerja yang diharapkan (*intended perfomance*) dengan praktek sehari-hari (*actual perfomance*), perbedaan antara tuntutan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan pelayanan aparatur pemerintah, dan perbedaan antara keterbatasan sumber daya anggaran pemerintah dengan kebocoran pada tingkat pelaksanaanya. Oleh karena itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa harus ada pelibatan, ruang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, dan koordinasi yang dinamis antara pemerintah dan masyarakat agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan baik karena sesuai dengan keinginan masyarakat.

Pelayanan publik juga dapat menjadi ukuran paling sederhana untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsinya. Dalam hal ini, kinerja aparatur negara sebagai representasi pelayan publik mempunyai dampak yang luas dalam tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat, begitu sebaliknya apabila sebagai penyelenggara maupun pelaksana pelayan publik yang kurang dalam melayani masyarakat maka tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat pun juga berkurang.

Sebagai jawaban, penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) dihadirkan sebagai sarana perbaikan pelayanan publik. Melalui FKP dilakukan evaluasi kinerja aparatur negara sehingga terjadi *improvement* pada kinerja pelayanan oleh aparatur negara selanjutnya. Penyelenggaraan FKP juga diharapkan dapat menjadi wadah partisipasi serta sarana menyerap aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan peraturan atau kebijakan sehingga dapat mengurai permasalahan yang dihadapi pada penyelenggaraan pelayanan publik antara pemerintah dan masyarakat sekaligus sebagai sarana mensinkronkan keinginan masyarakat dengan kebijakan pemerintah.

2. Tujuan dan Manfaat

a. Tujuan

- 1) Memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat, antara lain: pembahasan rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan yang ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 2) Menghimpun aspirasi dan harapan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik termasuk permasalahan dan isu strategis terkait pelayanan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa.

- 3) Menyamakan persepsi dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat menjawab dan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat

b. Manfaat

- 1) Manfaat dilaksanakannya FKP secara umum adalah menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik.
- 2) Manfaat FKP khusus bagi penyelenggara pelayanan :
 - a) memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
 - b) memperoleh bahan masukan dari publik dalam rangka perumusan maupun perbaikan kebijakan;
 - c) mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara;
 - d) mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan;
 - e) sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan untuk mengetahui efektifitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam memberikan layanan kepada publik;
 - f) memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan.
- 3) Manfaat FKP khusus bagi publik :
 - a) ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh UndangUndang Pelayanan Publik;
 - b) memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan;
 - c) memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan;

- d) menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan;

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

- a. Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- b. Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Oktober 2025

Waktu : Pukul : 09.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat Lt. 1 Hasan Usman Kantor Bupati Sumbawa

2. Penyelenggara dan Peserta FKP

Penyelenggara Forum Konsultasi Publik adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa sementara itu Peserta Forum Konsultasi Publik terdiri dari unsur :

- a. Akademisi;
- b. Pengguna layanan;
- c. Stakeholders pelayanan publik/instansi lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Jurnalis dari PWI Kab.Sumbawa.

3. Metode Pelaksanaan FKP

Forum Konsultasi Publik dilaksanakan menggunakan metode dimana peserta dapat saling memberikan pertanyaan, saran, dan kritik terkait kebijakan maupun masalah yang ditemukan. Forum Konsultasi Publik ini dipandu oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja selaku Ketua Tim Penyelenggara FKP yang selanjutnya Forum Konsultasi Publik ini dibuka oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa dan dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang penerapan Standar Pelayanan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Sumbawa dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh Ketua Tim Penyelenggara.

Sesi diskusi dan tanya jawab dalam Forum Konsultasi Publik ini membuat peserta dapat saling memahami permasalahan yang ada dan bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat.

Bentuk Penyelenggaraan FKP di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa dilakukan melalui tatap muka dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) : merupakan bentuk pertemuan semiformal antara penyelenggara pelayanan dan publik terkait dalam skala tidak terlalu besar yang lebih mengarah kepada metode diskusi dimana pihak penyelenggara dapat menjadi narasumber atau mengundang pakar yang ahli sesuai tema yang akan dibahas.

4. Susunan Acara FKP

Pembahasan dan susunan acara Forum Konsultasi Publik berfokus pada pemecahan masalah dari isu yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa dengan mekanisme perbaikan standar pelayanan dan evaluasi pelayanan yang sudah dilaksanakan.

Forum Konsultasi diawali dengan pembukaan atau pengarahan oleh pimpinan Instansi penyelenggara layanan dan dilanjutkan dengan pemaparan materi singkat.

Diskusi dilakukan secara dua arah dengan tujuan mendapatkan saran/masukan yang bermanfaat sebagai bahan perbaikan standar layanan dan perumusan kebijakan. Adapun susunan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik sebagai berikut :

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Pembacaan Doa (Kabid SDA)
4. Laporan Ketua Penyelenggara oleh Sekertaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa
5. Sambutan Sekaligus membuka acara secara resmi Forum Komunikasi Publik (FKP) oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Sumbawa

6. Penyampaian Materi, Diskusi, Saran dan Masukan
7. Penandatanganan berita acara
8. Penutup

C. HASIL PELAKSANAAN FKP

1. Identifikasi Masalah

Forum diawali dengan identifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan. Identifikasi masalah didefinisikan sebagai upaya untuk menjelaskan masalah dan membuat penjelasan dapat diukur. Selain itu, identifikasi masalah juga dapat diartikan sebagai proses dan hasil pengenalan masalah atau inventarisasi masalah. Identifikasi masalah pelayanan bisa dilakukan melalui :

- a. Komponen persyaratan;
- b. Profesionalitas dan integritas.

2. Analisis

Penyebab timbulnya masalah pada Pelayanan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa adalah:

- a. Penyusunan standar pelayanan harus diuraikan secara spesifik untuk mudah dipahami dan dijalankan oleh pelaksana pelayanan
- b. Profesionalisme dan integritas perlu ditingkatkan dengan mengandeng lembaga akademisi sebagai narasumber kegiatan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia pelaksana pelayanan.

3. Rencana Aksi

Setelah dilakukan identifikasi dan analisis masalah, dalam forum ini dirumuskan solusi/rencana aksi. Rencana aksi adalah langkah awal yang harus dilakukan jika kita ingin melakukan perubahan. Perubahan tersebut dapat berupa langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah -masalah yang ditemukan dalam identifikasi dan analisis permasalahan pelayanan.

Identifikasi masalah, analisis masalah dan rencana aksi dapat dituangkan dalam bentuk format tabel berikut :

Permasalahan dan rencana tindak lanjut perbaikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa :

Usulan rekomendasi perbaikan	Jangka waktu perbaikan
Penulisan narasi dalam setiap standar pelayanan (SP) disampaikan secara spesifik untuk mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana	2 (dua) bulan
Menggandeng lembaga akademisi untuk peningkatan kualitas dan profesionalisme anggota satpol PP sebagai pelaksana layanan	1 (satu) tahun

D. PENUTUP

A. Kesimpulan

Forum Konsultasi Publik ini merupakan upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik agar terbangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Adapun rincian kesimpulan dalam pelaksanaan FKP Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Dibutuhkan perbaikan penyusunan standar pelayanan guna perbaikan kualitas layanan penegakan Perda dan Perkada, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat. terutama dalam kecepatan pelayanan, penambahan parameter dan penambahan waktu pelayanan setiap hari untuk semua parameter.
2. Peningkatan kualitas pelaksana layanan dengan melibatkan pihak akademisi dalam kegiatan peningkatan sumber daya manusia anggota Satpol PP sebagai pelaksana layanan guna meningkatkan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien.
3. Secara umum pelanggan menyatakan puas dengan pelayanan di

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa, permasalahan yang ada bisa dijelaskan karena keterbatasan sarana dan SDM bisa diterima dan usulan-usulan pelanggan menjadi masukan untuk perbaikan pelayanan di tahun yang akan datang.

B. Saran

Berdasarkan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, kami sampaikan saran/usulan perbaikan sebagai berikut:

1. Kegiatan forum komunikasi publik perlu adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh karyawan dalam menciptakan pelayanan yang prima sesuai dengan dokumen mutu dan SOP pelayanan yang sudah ada.;
2. Adanya perhatian khusus dalam pengadaan sarana dan prasarana dengan dukungan anggaran yang lebih kondusif.;
3. Perlu adanya peningkatan kapasitas SDM dengan mengikuti diklat pelayanan publik dan adanya dukungan dari akademisi.

Sumbawa, Oktober 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sumbawa,

Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan
Kabid Tibum Tranmas,

ABDUL HARIS, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671110 199303 1 023

MUKHTAMARWAN, S.Pt
Pembina IV/a
NIP. 19720404 200801 1 017

LAMPIRAN I

BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Garuda No. 1 Telp (0371) 626689 Sumbawa Besar

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP) STANDAR PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA

Pada hari ini, Rabu, 15 Oktober 2025, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

NO	Identifikasi Masalah	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Penyelesaian
1.	Komponen persyaratan	Penulisan narasi dalam setiap Standar Pelayanan (SP) disampaikan secara spesifik untuk mudah dipahami	2 (dua) bulan
2.	Profesionalisme dan Integritas	Menggandeng lembaga akademisi untuk peningkatan kualitas dan profesionalisme anggota Satpol PP	1 (satu) Tahun

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progres tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Kabupaten Sumbawa, 15 Oktober 2025

No.	NAMA	NO HP	JENIS KELAMIN (L/P)	PERWAKILAN	TANDA TANGAN*
1.	Erma Suryani, M.Pd	-	P	Universitas Samawa	
2.	Iwan Setiawan, S.P., M.Si	-	L	Dispopar	
3.	IPDA Sugianto	-	L	Polres Sumbawa	
4.	Mukhtar Atmaja, S.Sos	-	L	Kantor Camat Sumbawa	
5.	Zainuddin, SH	-	L	Ketua PWI Kab. Sumbawa	
6.	Fakhrurrizki (Nyemin)	-	L	Ketua Forum UMKM Sumbawa	
7.	Ibnu Prijananda, SE	-	L	BNN Kabupaten Sumbawa	

*) Penandatanganan adalah masing-masing perwakilan dari Peserta FKP dan wajib mencantumkan nomor kontak/HP

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMBAWA,

ABDUL HARIS, S.Sos
NIP. 19671110 199303 1 023

SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUMBAWA,

MOHAMMAD LUTFI, S.Pt
NIP. 19730601 199803 1 005

*) Penandatanganan adalah Pimpinan Instansi dan Penyelenggara Pelayanan.

LAMPIRAN II
SALINAN DAFTAR HADIR



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Garuda No. 1 Telp (0371) 626689 Sumbawa Besar

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal : Rabu/ 15 Oktober 2025
Waktu : 09.30 S/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Hasan Usman Lantai I Kantor Bupati Sumbawa
Acara : Forum Komunikasi Publik Satpol PP Kab. Sumbawa

No	Nama	Instansi	Tanda tangan	No.HP
1.	Abdul Harris, S.Sos	Satpol PP		
2.	M. dyka-	Satpol PP		081339527448
3.	Honu Priyambada, SE	BNINK Sblw		0812 3844 0917
4.	M. SURAJEMAN	Satpol PP		
5.	Nati Surnama	DPMPKSP		085 23574655
6.	Emri Suryani	UNSA		081815826219
7.	Oklanhauri	DPMPKSP		0853387874
8.	SURYANTO	POLRI		08722553882
9.	APPAN	TNI		085137316944
10.	Iwan Setrawan	Dispopar		085783940962
11.	Supriati	Kes. Keweg. Polpp		081339735127
12.	Maria Gabriela	Kes. Perencanaan		081457405666
13.	Kamariah	Kes. Hukum		
14.	Mining Fitriani	prokopim		
15.	Erri Meute	- " -		
16.	Syurapudji	Satpol PP		
17.	Masamudji	- " -		
18.	Uti Kariska sari	- " -		
19.	L. BAGUS S.K.H.Y	Satpol PP		
20.	AVAT P.	Kel. UMRAMA		081281985808
21.	GABARIAN	Satpol PP		081339543745
22.	Hartito	Rps. HUKUM		087863664473
23.	Mukhtar Hanga	Kep. Cam. VBN		08123769716
24.	Sib Aminah	D2KB D3A		
25.	Maesa Tika M	DP2KB P3A		08123724801
26.	Zamudin	Puri Sumbawa		08123706389
27.	L. Istiwan	Koperindag		081339654505
28.	FAKHURRIZKI	Forum UPTKM		085161014546
29.	Rahman R. Bayat	Pol PP		082 240 02272

No	Nama	Instansi	Tanda tangan	No.HP
30.	HERIYANTO	POL PP		0817 6342 911
31.	Ofik	BNN		0852-5303130
32.	ARI KURNIAWAN	BEL. SEKETENG		
33.	Subagio			
34.	DEDEN SURYA F.	DISTHUB		
35.	ARYO APRIANTO	DISTHUB		
36.	SYAMSUL BAHRI	POL PP		
37.	MUUL SPANSIAH	POL PP		
38.	Nurhasanah	perencana		
39.	Orki Saputra, S-STP	Lurah Samapin		
40.	Hertan S	tabes		
41.	Astiantari L	"		
42.	Hannica	POL-PP		
43.	M. Ikhsan	POL PP		
44.	Amy Medys	"		
45.	ARDA API SAPTEA	11		
46.	L. NURHIDAY	KODIM 1607		
47.	M. NUR	KODIM 1607		
48.	EKA	KODIM 1607		
49.	CHATUR	Brang Biji		
50.	Rina	POL PP		
51.	INDRA KARSAN	Lempet		
52.	Zu Karna	Dinas		
53.	WAL JATIMANA	WILKAD		
54.	Siti aminah	Setda		
55.	Amir Afrillia	pekat		
56.	Erwanjati	POL PP		
57.	Dika Permana Citra	POL PP		
58.	S-ARI-P-J	POL PP		
59.	SUKMA Iklasi L.	Pengawal POL PP		
60.				
51.				
52.				
3.				
4.				

LAMPIRAN III
SURAT UNDANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Garuda No. 1 Telp (0371) 21032 – Fax 21032 Sumbawa Besar, NTB

Sumbawa, 13 Oktober 2025

Nomor : 300.1/531/ Satpol-PP/X/2025
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan

Kepada
Yth. (Daftar undangan terlampir)
di-
Tempat

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Forum Komunikasi Publik (FKP) tentang Standar Pelayanan Publik yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa Tahun 2025, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menghadiri kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 15 Oktober 2025
Waktu : 09.30 s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati Sumbawa

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran dan partisipasinya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



DR. H. BUDI PRASETIYO, S.Sos., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770627 200604 1 010

Lampiran Surat Pemerintah Kabupaten Sumbawa Sekretariat Daerah
Nomor : 300.1/531/ Satpol-PP/X/2025
Tanggal : 13 Oktober 2025

Daftar Undangan

1. Dandim 1607 Sumbawa
2. Kapolres Sumbawa
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kab. Sumbawa
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Sumbawa
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sumbawa
6. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sumbawa
7. Kepala Dinas Sosial Kab. Sumbawa
8. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sumbawa
9. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sumbawa
11. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Sumbawa
12. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Sumbawa
13. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Sumbawa
14. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kab. Sumbawa
15. BNN Kab. Sumbawa
16. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa
17. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Sumbawa
18. Rektor Universitas Sumbawa (UNSA)
19. Camat Sumbawa
20. Camat Unter Iwes
21. Camat Labuhan Badas
22. Lurah Seketeng
23. Lurah Brang Biji
24. Lurah Lempeh
25. Lurah Bugis
26. Lurah Brang Bara
27. Lurah Pekat
28. Lurah Samapuin
29. Lurah Uma Sima
30. Ketua PWI Kab. Sumbawa
31. Ketua UMKM Kab. Sumbawa

LAMPIRAN IV

DOKUMENTASI KEGIATAN

DOKUMENTASI KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI PUBLIK (FKP) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2025



Satpol PP
Kabupaten Sumbawa

BerAKHLAK  **bangga
melayani
bangsa**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

FORUM KONSULTASI PUBLIK SATUAN POLISI PAMONG PRAJA





Satpol PP
Kabupaten Sumbawa

BerAKHLAK **#bangga**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif **melayani**
bangsa



SatpolPP Sumbawa





Satpol PP
Kabupaten Sumbawa

BerAKHLAK **#** bangga melayani bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



SatpolPP Sumbawa

